



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2018

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan visi **"Terwujudnya Ketangguhan Penanggulangan Bencana"**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk ini disusun dengan mengacu kepada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja tahun 2018 serta dengan memperhatikan Peraturan Perundang – Undangan Standard Operasional Prosedur maupun Standard Pelayanan minimal bidang kebencanaan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini selain sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan pemangunan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga dapat terselenggara dengan optimal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di bidang kebencanaan dan secara sinergi mendukung pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, Januari 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk



Ir. SOEKONJONO, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19630419 199003 1 008

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ikhtisar Eksekutif

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

B. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA OPD

A. RENCANA STRATEJIK

1. Visi
2. Misi
3. Analisa SWOT dan CSF
4. Tujuan
5. Sasaran
6. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

B. PENETAPAN RENCANA KINERJA.

1. Sasaran Tahun Bersangkutan Yang Ingin Dicapai
2. Standar Penilaian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB IV. PENUTUP

Daftar Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk ;
8. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 10 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang rincian tugas, fungsi Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Penanggulangan Bencana.

II. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Program, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan kerumahtanggaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Sub Penyusunan Program

Mempunyai Tugas merumuskan penyusunan program kerja di bidang Penanggulangan bencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sub bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan rencana kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Penanggulangan Bencana.
- b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan pengembangan kerjasama lintas sektor.
- c. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi manajemen dan pelaporan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan di bidang penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merumuskan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan evaluasi dan pelaporan keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- c. Pelaksanaan penyusunan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas keuangan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan pengelolaan tata naskah dinas.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor dan kerumahtanggaan.
- c. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- e. Penyusunan laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- d. Pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Resiko Bencana (PRB) dan Mitigasi.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan.
- g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pencegahan/Mitigasi

Seksi Pencegahan/Mitigasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan kegiatan Pencegahan/Mitigasi.

Seksi Pencegahan/Mitigasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pencegahan / Mitigasi
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan dukungan teknis pencegahan bencana
- d. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, identifikasi, fasilitasi
- e. Penyusunan pedoman standarsisasi teknis Analisis Resiko bencana dan Mitigasi bencana
- f. Penyusunan peta wilayah rawan bencana
- g. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Bencana
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi

2) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kesiapsiagaan.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan.
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesiapsiagaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi.
- e. Penyusunan standar teknis peringatan dini dalam kegiatan Pencegahan Bencana.
- f. Pemantauan wilayah resiko terjadinya bencana, penerapan wilayah siaga bencana, dan penyiapan potensi sumberdaya.
- g. Pengendalian dan pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kesiapsiagaan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas : merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kedaruratan dan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik
- d. Pemberiaan komando pelaksanaan penanggulangan bencan pada saat tanggap bencana
- e. Pengendalian oprasional penanganan tanggap darurat
- f. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban
- g. Pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana
- h. Pelaksanaan distribusi oprasional peralatan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Kedaruratan

Seksi kedaruratan Mempunyai Tugas : Kameranumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang kedaruratan

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kedaruratan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan
- d. Pengendalian operasi dan komando penanggulangan bencana pada saat penanggulangan bencana
- e. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- f. Pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana
- g. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Logistik

Seksi Logistik Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang logistik

Seksi Logistik mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan teknis di bidang logistik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Logistik
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Logistik
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan pengadaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- f. Pelaksanaan analisis kebutuhan Logistik dan Peralatan
- g. Pelaksanaan pemantuan distribusi kebutuhan logistik dan Peralatan
- h. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan logistik dan peralatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsi

V. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Pemberiaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana, estimasi pembiayaan sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sarana fisik dan sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
- g. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, kompensasi dan pemngambilan hak pengungsi
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi
- b. Pemberian dukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rehabilitasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajiaan, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kerusakan pasca bencana
- f. Pelaksanaan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat samapi tingkat yang memadai
- g. Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik dan sosial ekonomi di wilyah pasca bencana
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan langsung sesuai dengan ttugas dan fungsinya

2) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi Mempunyai Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Rekonstruksi .

Seksi Rekonstruksi Mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rekontruksi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rekontruksi
- d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan fasilitasi
- e. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi di wilayah pasca bencana
- f. Pelaksanaan penempatan, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi
- g. Pelaksanaan pemulihan saran adan prasarana kelembagaan di wilayah pasca bencana
- h. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya

Daftar Pejabat Struktural dan Staf BPBD.

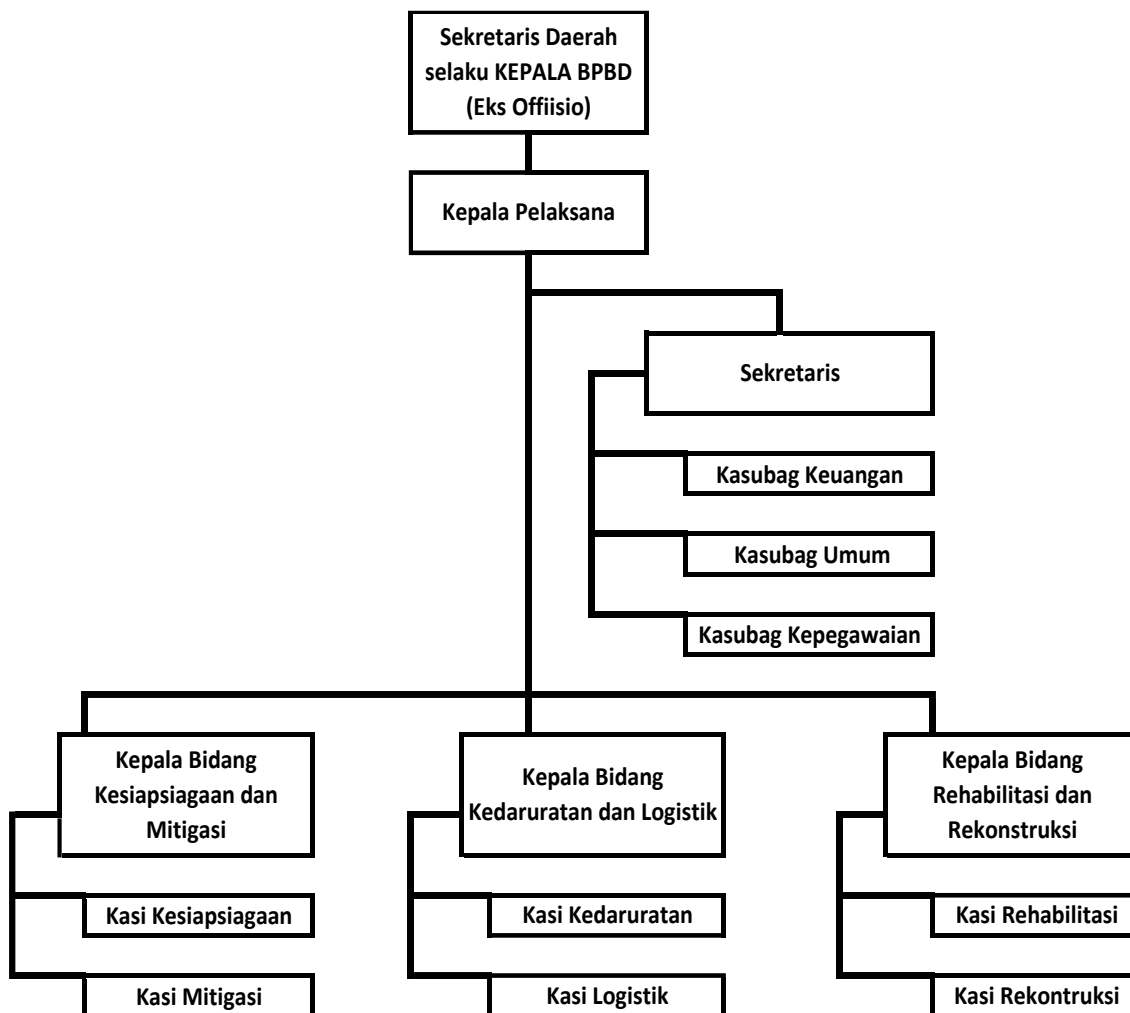
No	Pejabat	Pangkat/Gol	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Kepala OPD	Pembina Utama Muda / IVc	S-2 (MT)	1 org	
2.	Sekretaris	Penata Tingkat I/IIIId	SLTA	1 org	
3.	Kabid PMK	Pembina/IVa	S-1 (Drs)	1 org	
4.	Kabid KL	-	-	-	Kosong
5.	Kabid RR	Pembina/IVa	S-2 (MT)	1 org	
6.	Subbag Sungram	Penata Tingkat I/IIIId	S-1 (SIP)	1 org	
7.	Subbag Umum K	Penata Tingkat I/IIIId	S-1 (Dra)	1 org	
8.	Subbag Keuangan	Penata/IIIc	S-1 (S.Sos)	1 org	
9.	Kasi Kedaruratan	Pembina/IVa	S-2 (M.Pd)	1 org	
10.	Kasi Logistik	-	-	-	Kosong
11.	Kasi PM	Penata/IIIc	S-2 (MM)	1 org	
12.	Kasi PK	Penata Tingkat I/IIIId	S-1 (SP)	1 org	
13.	Kasi Rehabilitasi	Penata Tingkat I/IIIId	D-III (Amd P)	1 org	
14.	Kasi Rekonstruksi	---	-	-	kosong
15.	Staf	Penata Muda Tk./IIIb	S-1 (S.Sos)	1 org	
16.	Staf	Penata Muda Tk./IIIb	S-1 (SH)	1 org	
17.	Staf	Pengatur Tk./IIId	S-1 (S.Sos)	1 org	
18.	Staf	Pengatur Tk./IIId	S-1 (SE)	1 org	
19.	TRC	---	S-2	1 org	
20.	TRC	---	S-1	4 org	
21.	TRC	---	D-2	1 org	
22.	TRC	---	SLTA	17 org	
23.	TRC	---	SLTP	2 org	
24.	Honorar Lain	---	SLTA	2 org	
	Jumlah			42 org	

Daftar Prasarana Operasional OPD dan Prasarana Dasar Bencana

No	Jenis sarana prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Prasarana Operasional OPD Kendaraan Roda 4 (Daerah) Kendaraan Roda 4 (Pusat) Sepeda Motor (Daerah) Sepeda Motor (Pusat) Chain Saw (Pusat/Prop) Chain Saw (Daerah) Rak Kayu	5 unit 2 unit 6 unit 3 unit 3 unit 3 unit 8 unit	

	Filling Besi Filling Kayu Perkakas Kantor Lemari Kayu Papan Nama Meja Kayu Kursi kayu Meja rapat Kursi rapat Kursi tamu Kursi putar Sofa Ac unit Kipas angin Wireless Handy cam Dispenser PC unit Lap top Printer Faximile Scanner Meja kerja pejabat Kursi kerja pejabat Bangunan gedung kantor Bangunan gedung kantor permanen Bangunan gedung garasi Lain – lain Bangunan menara/bak penampung/reservok air minum	24 unit 3 buah 1 buah 7 unit 9 unit 32 unit 3 unit 8 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 8 unit 6 unit 2 unit 6 unit 7 unit 10 unit 8 unit 8 unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	
2.	Prasarana dasar bencana Camera Elektronik Handy Talky Alat komunikasi radio SSB (Pusat) Radio REG (Pusat) Unit Transceiver SSB stationa + E2210ry Alat khusus Penerbangan (Drone) Alat Khusus SAR Sumur dengan Pompa Alqon Diesel Genset Perahu Karet (Pusat) Perahu Karet (Daerah) Tenda Dome	3 unit 30 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Paket 4 unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit	

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**
(Peraturan Bupati Nganjuk No.10 Tahun 2012)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

1. VISI : TERWUJUDNYA KETANGGUHAN PENANGGULANGAN BENCANA

- Terwujud : merupakan bentuk situasi dan kondisi yang baik
- Tangguh : merupakan bentuk kemampuan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan dan pemulihan situasi kondisi yang membawa dampak positif
- Penanggulangan : upaya penanganan bencana ,terdiri pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana
- Bencana : meliputi bencana sesuai ketentuan undang-undang no.24 tahun 2007.

2. MISI :MENINGKATKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI ANCAMAN BENCANA MELALUI KESIAPSIAGAAN, MITIGASI, TANGGAP DARURAT BENCANA DAN PASCA BENCANA YANG TERPROGRAM DAN TERPADU

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

- Meningkatkan perlindungan : :segala upaya perencanaan, pengendalian dan pengamanan terhadap dampak bencana
- Masyarakat : semua orang dari berbagai strata social ekonomi, budaya beserta lingkungannya
- Ancaman bencana : bencana alam, bencana social, bencana ekonomi dan bencana budaya
- Mitigasi/Pengurangan Resiko Bencana: Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko timbulnya bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana : Serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dang penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alan dan / atau non factor alam maupun factor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bvenda dan dampak psikologis.
- Terprogram dan terpadu : direncanakan, dibahas dan ditindaklanjuti bersama-sama dengan lembaga/ dinas, organisasi, unsure masyarakat secara terkoordinasi dalam pos komando pengendalian penanggulangan bencana daerah

3. Analisa SWOT dan CSF

Adapun Sasaran (*objective*) pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Sasaran (*objective*) pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

Guna menentukan sasaran penanggulangan bencana perlu dirumuskan melalui identifikasi dan evaluasi factor internal dan eksternal.

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Adanya Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana 2. Adanya dukungan Pemerintah/ Pemda. 3. Adanya motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik	1. Kurang optimalnya sistem siaga bencana 2. Kurang optimalnya perencanaan dan standard pelayanan penanggulangan bencana 3. Kurang optimalnya pemahaman dan respon lembaga terhadap penanggulangan bencana
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG	ANCAMAN
1. Adanya Struktur organisasi yg didukung peraturan perundangan 2. Adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana penanggulangan bencana 3. Adanya Akses komunikasi kebencanaan dengan lembaga dan masyarakat	1. Banyaknya wilayah / kawasan rawan bencana 2. Banyaknya bencana yang parsial dan tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat 3. Besarnya kerusakan insfrastruktur dan korban dampak bencana

EVALUASI FAKTOR KEKUATAN TERHADAP FAKTOR PELUANG

- 1) *Meningkatkan kapasitas Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan struktur organisasi yang didukung peraturan perundangan*
- 2) Meningkatkan kapasitas dukungan Pemerintah/ Pemda dengan memanfaatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana penanggulangan bencana

- 3) Meningkatkan kapasitas motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik dengan memanfaatkan Akses komunikasi kebencanaan dengan lembaga dan masyarakat

EVALUASI FAKTOR KEKUATAN-TERHADAP FAKTOR ANCAMAN

- 1) Meningkatkan kapasitas Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana untuk mengantisipasi wilayah / kawasan rawan bencana
- 2) Meningkatkan pemanfaatan dukungan Pemerintah/ Pemda untuk mengantisipasi kerusakan dan korban dampak bencana
- 3) *Meningkatkan kapasitas motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik untuk mengantisipasi bencana yang parsial dan tututan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat*

EVALUASI FAKTOR KELEMAHAN- TERHADAP FAKTOR PELUANG

- 1) *Mendayagunakan sistem siaga bencana dengan memanfaatkan Akses komunikasi kebencanaan dengan lembaga dan masyarakat*
- 2) Mendayagunakan perencanaan dan standard pelayanan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan dukungan anggaran dan sarana prasarana penanggulangan bencana
- 3) Mendayagunakan pemahaman dan respon lembaga terhadap penanggulangan bencana dengan memanfaatkan Struktur organisasi yg didukung peraturan perundangan

EVALUASI FAKTOR KELEMAHAN TERHADAP FAKTOR ANCAMAN

- 1) Mendayagunakan sistem siaga bencana dengan mengantisipasi wilayah / kawasan rawan bencana
- 2) Mendayagunakan perencanaan dan standard pelayanan penanggulangan bencana untuk mengantisipasi bencana yang parsial dan tututan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat
- 3) *Mendayagunakan pemahaman dan respon lembaga terhadap penanggulangan bencana untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur dan korban dampak bencana*

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi BPBD Kabupaten Nganjuk perlu ditetapkan Tujuan pembangunan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program

pembangunan kabupaten secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

1. Meningkatnya perlindungan masyarakat korban bencana melalui kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
2. Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana melalui tanggap bencana, darurat bencana dan pasca bencana

4. Sasaran

Hasil evaluasi faktor internal-eksternal dalam bab II, disimpulkan dan ditetapkan menjadi

PRIORITAS SASARAN :

1) Meningkatkan kapasitas Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan struktur organisasi yang didukung peraturan perundangan

SASARAN (1)

Terwujudnya struktur organisasi yang didukung peraturan perundangan dengan kapasitas Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana

2) Meningkatkan kapasitas motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik untuk mengantisipasi bencana yang parsial dan tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat

SASARAN (2)

Terpenuhinya tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dengan kapasitas motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik untuk mengantisipasi bencana yang parsial

3) Mendayagunakan sistem siaga bencana dengan memanfaatkan Akses komunikasi kebencanaan dengan lembaga dan masyarakat

SASARAN (3)

Tercapainya Akses komunikasi kebencanaan bersama lembaga dan masyarakat dengan mendayagunakan sistem siaga bencana

4) Mendayagunakan pemahaman dan respon lembaga / unsur masyarakat terhadap penanggulangan bencana untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur dan korban dampak bencana

SASARAN (4)

Terlaksananya perbaikan infrastruktur yang rusak dan terlindunginya korban dampak bencana dengan peran aktif / respon lembaga/ unsure masyarakat terpadu

Untuk melaksanakan Tujuan 1 :

Mewujudkan Perlindungan Masyarakat Korban Bencana melalui Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, perlu ditetapkan sasaran

- Terwujudnya struktur organisasi yang didukung peraturan perundangan dengan kapasitas Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana (SASARAN 1)
- Tercapainya Akses komunikasi kebencanaan bersama lembaga dan masyarakat dengan mendayagunakan sistem siaga bencana (SASARAN 3)

Untuk melaksanakan Tujuan 2 :

Meningkatkan Ketangguhan Penanggulangan Bencana melalui Tanggap Bencana, Darurat Bencana dan Pasca Bencana perlu ditetapkan sasaran :

- Terpenuhinya tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dengan kapasitas motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik untuk mengantisipasi bencana yang parsial (SASARAN 2)
- Terlaksananya perbaikan infrastruktur yang rusak dan terlindunginya korban dampak bencana dengan peran aktif / respon lembaga/ unsure masyarakat terpadu (SASARAN 4)

Pengelompokan sasaran sesuai UU no.24 tahun 2007, sasaran utama penanggulangan bencana meliputi tahapan :

1) Pra bencana (Bagian sekretariat dan Bidang Kesiapsiagaan dan Mitigasi)

- 1) Terwujudnya struktur organisasi dengan kapasitas Fungsi Komando dan relawan/ TRC yg profesional dalam penanggulangan bencana
- 2) Tercapainya Akses komunikasi kebencanaan bersama lembaga dan masyarakat dengan mendayagunakan sistem siaga bencana

2) Tanggap darurat dan darurat bencana (Bidang Kedaruratan dan Logistik)

- Terpenuhinya tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan penanganan korban bencana yang cepat dengan kapasitas motivasi dan kemampuan komunikasi informasi yang baik

3) Pasca bencana (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

- Terlaksananya perbaikan infrastruktur sarana prasarana dampak bencana dengan peran aktif / respon lembaga/ unsure masyarakat terpadu

Hasil kajian internal terhadap kemudahan penilaian dalam akuntabilitas kinerja, capaian dan kesesuaian dengan kegiatan maupun target yang selama ini dilaksanakan maka dilakukan penyederhanaan Sasaran Strategis dari 4 (empat) item menjadi 2 (dua) sasaran, yaitu :

Tujuan 1 ; Mewujudkan Perlindungan Masyarakat Korban Bencana melalui Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, dengan sasaran strategis

- Terwujudnya struktur organisasi yang didukung peraturan perundangan dengan kapasitas Fungsi Komando dan relawan TRC yg berpengalaman dan profesional dalam penanggulangan bencana (SASARAN 1)
- Tercapainya Akses komunikasi kebencanaan bersama lembaga dan masyarakat dengan mendayagunakan sistem siaga bencana (SASARAN 3)

Menjadi ; Terpenuhinya Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

Tujuan 2 ; Meningkatkan Ketangguhan Penanggulangan Bencana melalui Tanggap Bencana, Darurat Bencana dan Pasca Bencana perlu ditetapkan sasaran :

- Terpenuhinya tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dengan kapasitas motivasi pimpinan dan kemampuan komunikasi informasi yang baik untuk mengantisipasi bencana yang parsial (SASARAN 2)
- Terlaksananya perbaikan infrastruktur yang rusak dan terlindunginya korban dampak bencana dengan peran aktif / respon lembaga/ unsure masyarakat terpadu (SASARAN 4)

Menjadi ; Tercapainya Cakupan Penanganan Penanggulangan Bencana

4. **Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan misi **meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana melalui kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan bencana yang terprogram dan terpadu, dijabarkan dengan serangkaian Strategi sebagai berikut :**

- 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan budaya untuk diterapkan dalam penanggulangan bencana yang terpadu berbagai unsur
- 2) Mengalokasikan Pagu Indikatif dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 3) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan keadilan dan berorientasi pada peningkatan sosial ekonomi.
- 4) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif

Serangkaian Strategi tersebut di atas dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Korban Bencana melalui Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

- 1) Mengoptimalkan fungsi aparaturnya baik intern OPD maupun dalam sistem komando penanggulangan bencana
- 2) Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Kebencanaan.
- 3) Mengalokasikan anggaran Pagu Indikatif OPD melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen dan penatabaga usaha keuangan.
- 4) Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan performance dan profesionalisme pegawai dan koordinasi lembaga terkait
- 5) Meningkatkan kajian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan yang partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi pada masa pra bencana
- 6) Memberdayakan pemerintahan desa dan kecamatan untuk mandiri dalam siaga bencana dengan memanfaatkan Program Dana Desa
- 7) Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati kebencanaan secara optimal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

2. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Ketangguhan Penanggulangan Bencana melalui Tanggap Bencana, Darurat Bencana dan Pasca Bencana

- 1) Meningkatkan pengelolaan barang inventaris dan logistik melalui pengembangan sistem informasi manajemen logistik
- 2) Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme komando dan monitoring tindak lanjut.
- 3) Meningkatkan profesionalisme aparat pelaksana dan Tim reaksi cepat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak sesuai ketentuan.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan komunikasi informasi poskodalo dan poskolap melalui kecukupan sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif.
- 5) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Perlindungan korban bencana dalam siaga darurat dan tanggap darurat
- 7) Meningkatkan kondisi / kelancaran transportasi dalam penanggulangan bencana
- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar hunian korban bencana yang layak dan sehat dengan mendorong swadaya masyarakat

- 9) Meningkatkan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan prasarana lingkungan

Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan, dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan sedangkan BPBD melaksanakan salah satu urusan wajib.

Urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib BPBD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2014 - 2018 diantaranya adalah dilaksanakan dengan program-program :

- a. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- b. Program kesiapsiagaan dan pencegahan bencana alam
- c. Program Penanganan Pasca Bencana

sesuai tupoksi berdasar undang-undang No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nganjuk No. 2 tahun 2012 adalah:

- a. Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam (**Tahap Pra Bencana**), dilaksanakan pada Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- b. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (**Tahap Tanggap Bencana**), dilaksanakan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik
- c. Program Penanganan Pasca Bencana (**Tahap Pasca Bencana**), dilaksanakan pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan

A. Bagian Sekretariat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan terdiri :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan Meubelair
4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD,
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

B. Bidang Kesiapsiagaan Dan Mitigasi Bencana

Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam

Kegiatan terdiri :

1. Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana metode Out Bound,
2. Sosialisasi Pencegahan dan pengurangan resiko bencana desa rawan.
3. Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan / Mitigasi Bencana,.
4. Pelaksanaan koordinasi posko siaga / Tanggap bencana,
5. Penguatan Kapasitas Relawan Masyarakat Penanggulangan Bencana,.
6. Pengadaan Perahu Karet,.

C. Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Program **pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam atau program Penanganan bencana alam**

Kegiatan terdiri :

1. Pengadaan Prasarana Dasar Tanggap Darurat Bencana
2. Penguatan sistem Komando pusat pengendali operasi penanganan bencana,
3. Operasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
4. Operasi Penanganan Darurat Kekeringan (Dropping Air Bersih)
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tanggap Darurat Bencana

D. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Program' Penanggulangan Pasca Bencana

Kegiatan terdiri :

1. Penyediaan Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

B. PENETAPAN KINERJA RENCANA KINERJA

1. Sasaran Tahun Bersangkutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program / Kegiatan	Anggaran			
			A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Terpenuhinya Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	10 Fasilitas Sarana Penanggulangan Bencana yang memenuhi kapasitas fungsi ; 1. Pusat Komando, 2. Personil Komando, 3. Posko Lapangan, 4. Pergudangan, 5. Sarana dan Prasarana Transportasi, 6. Peralatan Rescue 7. Perlengkapan Rescue dan Evakuasi , 8. Sarana Komunikasi, 9. Data 10. Informasi	12 bulan	1.Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000			
			12 bulan	2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.800.000			
				3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000			
			12 bulan	4.Penyediaan alat tulis kantor	25.953.000			
			12 bulan	5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.800.000			
			12 bulan	6.Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	18.237.000			
			12 bulan	7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.920.000,-			
			12 bulan	8.Penyediaan makanan dan minuman	37.500.000			
			12 bulan	9.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	279.291.000			
			12 bulan	10.Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000			
						B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
			1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	200.000.000			
			3 Paket	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000			
			4 Unit	Pengadaan Peralatan gedung/ Kantor	33.000.000			
			1 Paket	Pengadaan Mebeleur	10.000.000			
			12 bulan	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	151.557.516			
			12 bulan	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,-			
			12 bulan	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000			
			6 bulan	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	15.000.000			
						C	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
			12 Bulan	Penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	10.000.000			
			6 Bulan	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000			
			12 Bulan	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000			

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
			D	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	
			60 Peserta	Diklat teknis penanggulangan bencana/ metode out bound	110.000.000
			8 Desa	Sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana desa rawan bencana	40.000.000
			300 Peserta (siswa dan pengajar)	Bimbingan teknis kesiapsiagaan /mitigasi bencana	100.000.000
			10 lokasi/ 10 kegiatan	Penanganan Mitigasi Struktural pra bencana pada desa tangguh	150.000.000
			12 Bulan	Pelaksanaan koordinasi pos siaga/tanggap bencana	75.000.000
			100 Orang	Penguatan kapasitas relawan masyarakat penanggulangann bencana	50.000.000
			2 Unit	Pengadaan Perahu Karet	30.000.000
			2 Lokasi	Penanganan Mitigasi Struktural Pra Bencana pada Wilayah Kecamatan Rawan Bencana	10.000.000
			19 Jenis	Pengadaan Peralatan Rescue	60.000.000
			30 Orang	Bimbingan Teknis Analisis Kerugian Akibat Bencana	50.000.000
			10 Desa	Pelatihan Relawan Desa Tangguh	300.000.000
				Pengadaan Felbet dan Perlengkapannya	100.000.000
				Pembuatan Sumur Resapan	150.000.000
2.	Tercapainya Cakupan Penanganan Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana	E	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
			150 Unit	Pengadaan prasarana dasar tanggap darurat	150.000.000
			12 Bulan	Penguatan Sistem Komando Pusat Pengendalian Operasi bencana	565.000.000
			12 Bulan	Operasi Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan	75.000.000
			17 Desa	Penanganan tanggap darurat kekeringan (droping air)	175.895.000
			200 Paket	Pemenuhan kebutuhan dasar tanggap darurat	100.000.000
			1 Unit	Sarana Prasarana Penyediaan Air pada Kawasan Rawan Kekeringan	200.000.000
			F	Penanggulangan Pasca Bencana	
			20 Unit	Penyediaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	36.000.000

2. Standard Penilaian Kinerja

No	Nilai (%)	Pencapaian
1.	80- lebih dari 100	Tercapai
2.	60 – 79	Kurang tercapai
3.	Kurang dari 60	Tidak tercapai

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berpedoman pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana. Sarana dan prasarana tersebut dinamakan “fasilitas komando tanggap darurat bencana”, yang terdiri dari Pusat Komando, Personil Komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. Capaian kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Tahun 2018 10 fasilitas
- Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Tahun 2018 yang terpenuhi 10 fasilitas
- Target Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Tahun 2018 100%
- Realisasi Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Tahun 2018 100%
- Capaian kinerja Tahun 2018 100%

Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Tahun 2018 adalah 10 fasilitas. Selama Tahun 2018 semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi guna mendukung pelaksanaan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Nganjuk. Rincian sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Jenis kebutuhan	Klasifikasi	Jumlah
1.	Pos Komando	a. PUSDALOPS b. POSKOLAP	Fasilitas dasar	1 unit 12 unit
2.	Personil Komando	TRC	Fasilitas dasar	18 orang
3.	Gudang	a. Gudang logistik/ kebutuhan dasar b. Gudang peralatan/prasarana dasar	Fasilitas dasar	1 unit 1 unit
4.	Sarana dan prasarana transportasi	a. Mobil rescue b. Perahu karet c. Perahu evakuasi	Fasilitas dasar Fasilitas dasar (bencana banjir)	1 unit 1 unit 1 unit
5.	Peralatan	a. Tenda pengungsi b. Tenda pleton c. Tenda regu	Fasilitas dasar	2 unit 10 unit 25 unit

No.	Fasilitas	Jenis kebutuhan	Klasifikasi	Jumlah
		d. Velbed e. Matras f. Kantong tidur g. Genset h. Mobil tangki i. Dapur umum j. Eskavator		50 buah 50 buah 50 buah 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
6.	Alat komunikasi	a. HT b. RPU c. Radio UHF/VHF d. Radio SSB e. Mesin fax f. Komputer g. Akses internet	Fasilitas dasar	25 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
7.	Data dan informasi	a. Informasi bencana b. Informasi korban bencana c. Peta rawan bencana	Fasilitas dasar	1 unit 1 unit 1 unit

Dalam rangka pencapaian sasaran "terwujudnya mitigasi bencana alam" didukung dengan alokasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp. 2.511.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.925.268.834,00 atau 76,67%, sebagaimana dalam rincian sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	474.601.000,00	404.842.083,00	85,30
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	558.000.000,00	450.405.388,70	80,72
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	16.163.000,00	80,82
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.225.000.000,00	1.114.323.900,00	90,97
6.	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	1.265.895.000,00	1.202.185.782,00	94,97
7.	Program Penanggulangan Pasca Bencana	36.000.000,00	12.234.950,00	33,99
Jumlah		3.579.496.000,00	3.200.155.103,70	89,40

Pencapaian sasaran "terwujudnya mitigasi bencana alam" didukung dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Gladi Lapangan Penanggulangan bencana	Personil	60	melibatkan Tim Reaksi Cepat BPBD dan Masyarakat/Relawan Penanggulangan

				Bencana
2.	Penguatan kapasitas relawan/ sertifikasi relawan nasional	Personil	100	TRC/Relawan Penanggulangan Bencana
	Pembentukan Desa Tangguh	Desa	10	Desa Wilayah Potensi Bencana
3.	Bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Orang	100	Siswa dan Pembina
4.	Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Desa	8	
5.	Pelaksanaan Koordinasi Posko Siaga dan Tangap Darurat	Personil	250	TRC, Relawan dan Organisasi
6.	Bantuan Mitigasi Struktural	Desa	2	Penanaman Pohon Wilayah Potensi Longsor
7.	Pengadaan Peralatan Rescue	Unit	9	Sarana Vertikal Rescue
8.	Bintek Analisis Kerugian Dampak Bencana	Personil	30	Instansi Wilayah Potensi Bencana
9.	Operasi penanganan darurat kekeringan (dropping air bersih)	Desa	17	
10.	Pengadaan prasarana Dasar Tangap Darurat Bencana	Unit	150	Sesek, Bronjong dan Gepyok dan Glangsing
11.	Pengadaan kebutuhan dasar tanggap darurat bencana	Paket	200 paket	
12.	Pengadaan Sarana Angkut Perahu	Unit	1	Gerobak Angkut
13.	Penguatan Sistem Komando	Personel	24	
14.	Bantuan Upaya Penanganan Kebakaran Hutan Lahan	Lokasi Kecamatan	5	
15.	Sosialisasi dan Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat	Unit	1	Kapasitas Pusdalops

2. CAKUPAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Pencapaian indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana. Capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Jumlah bencana pada Tahun 2018 96 Bencana
- Jumlah bencana yang tertangani Tahun 2018 96 Bencana
- Target Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam Tahun 2018 100%
- Realisasi Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam Tahun 2018 100%

Ikhtisar Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang tercapai	Tidak tercapai
1.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	100 %		
2.	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%		

Capaian Sasaran Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Pencapaian		
		Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya struktur organisasi dengan kapasitas Fungsi Komando dan relawan / TRC yg profesional dalam penanggulangan bencana	1.Gedung Kantor dan Gudang (Logistik & Peralatan /Sarana) 2.Sarana Prasarana Kendaraan (Mobil/Motor Rescue, Tangki, Mobil Operasional dan Perahu) 3.Peralatan (Alat Rescue, Selam dan Perlengkapan)	3 fasilitas	3 fasilitas	100
Tercapainya Akses komunikasi kebencanaan bersama lembaga dan masyarakat dengan mendayagunakan sistem siaga bencana	1.Pos Komando (Pusdalops & Poskolaps) 2.Personel Komando (TRC) 3.Data dan Jaring Informasi (Peta Rawan, Data Kejadian dan Koordinasi Lintas) 4.Peralatan Komunikasi	4 fasilitas	4 fasilitas	100
Terpenuhinya tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan penanganan korban bencana yang cepat dengan kapasitas motivasi dan kemampuan komunikasi informasi yang baik	Cakupan Penanggulangan Bencana Masa Tanggap	96 kejadian	80 penanganan	100
Terlaksananya perbaikan infrastruktur sarana prasarana dampak bencana dengan peran aktif / respon lembaga/ unsure masyarakat terpadu	Cakupan Penanggulangan Bencana Masa Pasca			

Rekapitulasi Bencana di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

No.	Jenis	Jumlah (kejadian)	Lokasi	Kerugian/ Dampak	Penyebab
1.	Banjir	10	Pace, Gondang, dan Rejoso,	Merusak akses jalan, sarana umum, jembatan, pertanian dan rumah warga, kerugian materi	Hujan dengan intensitas tinggi
2.	Tanah Longsor	12	Sawah, Rejoso, Ngetos, Loceret, Lengkon, dan Ngluyu	Menutup akses jalan, sarana umum, irigasi, kerugian materi, dan merusak rumah warga	Hujan deras
3.	Puting beliung/ angin kencang	9	Sawah, Pace, Tanjunganom, Loceret, Berbek, Nganjuk, dan Ngluyu	Mengganggu akses jalan, merusak rumah dan bangunan warga, merusak kabel/jaringan listrik, dan kerugian materi lainnya	Angin kencang

4.	Kebakaran hutan/lahan	36	Berbek, Bagor, Rejoso, Wilangan, Ngetos, Sawahan, Lengkong, dan Loceret	Kerugian materi dan terbakarnya kayu hutan	Orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dikenal membuang puntung rokok dan membakar sarang hewan, Gesekan antar kayu kering
5.	Kebakaran rumah	8	Rejoso, Loceret, Tanjunganom, Ngluyu, Sukomoro, Jatikalen dan Baron	Kerugian materi, terbakarnya rumah dan kandang	Hubungan arus pendek listrik, api kompor dapur
6.	Kejadian luar biasa (KLB)	8	Bagor, Baron, Prambon, Ngluyu dan Rejoso	Kerugian materi dan korban jiwa	Tenggelam, Tercebur Sumur
7.	Gempa Bumi	1	Bagor	Dampak tidak dirasakan	
8.	Kekeringan	12	Lengkong, Ngluyu, Gondang, Ngetos, Loceret, dan Jatikalen		
	Jumlah	96			

Sumber : Data Kejadian Bencana BPBD Kab. Nganjuk Periode 2018

Dari kasus bencana tersebut telah tertangani semuanya dengan melakukan upaya sebagai berikut:

Dari kasus bencana tersebut telah tertangani semuanya dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Pusdalops, Poskolap Siaga dan Darurat serta koordinasi dengan instansi terkait.
- b) Aktivasi posko tanggap darurat dan pendirian posko lapangan di Rejoso, gondang, sawahan, loceret, pace, berbek, ngetos, lengkong, patianrowo, jatikalen.
- c) Distribusi sembako bersama lembaga/ instansi sosial
- d) Perbaikan darurat tanggul jebol bersama DPU pengairan.
- e) Survey kebutuhan belanja kerusakan rumah roboh bersama DPU Cipta Karya.
- f) Kerja bakti normalisasi dam bersama instansi terkait.
- g) normalisasi sungai-sungai / waduk dan rehabilitasi tanggul sungai, bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, DPU pengairan, BBWS Brantas Surabaya
- h) Pembuatan water torn.
- i) Pemasangan tandon air bersih
- j) Pengeboran dan Pembuatan Sumur Resapan
- k) Rekonstruksi rumah yang rusak.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

Pemahaman konsep dan operasional terkait kebencanaan masih sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas administrasi perencanaan dan kelembagaan OPD tingkat pusat hingga daerah. Sehingga menimbulkan standarisasi yang berbeda beda terhadap kinerja

tugas OPD BPBD, namun senyatanya jika dilakukan secara administrasi sulit kemungkinan mendukung kelancaran operasional lapangan.

Solusi

1. Memperbaiki konsep pemahaman dan perencanaan masalah urusan kebencanaan ;
2. Penetapan SOP maupun SPM bidang kebencanaan secara rinci dengan menyesuaikan kondisi potensi dan permasalahan bencana di daerah ;
3. Meningkatkan rapat koordinasi dengan instansi terkait ;
4. Melakukan koordinasi intensif melalui Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana dan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan mengerahkan semua sumberdaya instansi, lembaga dan organisasi yang terkait tanggap darurat bencana, baik melalui pinjam, sewa prasarana mobil tangki, sumberdaya manusia terkait petugas teknis dan sebagainya ;
5. Mengerahkan Tim Reaksi Cepat dan relawan yang selalu siaga 24 jam dalam Pusdalops PB maupun Posko Lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Nganjuk kepada publik.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 dengan kualitas pelaksanaan baik, sehingga tetap perlu menjaga kinerja untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang - undangan yang berlaku.

Nganjuk, Januari 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk



Ir. SOEKONJONO, MT
Pembina Utama Madya
NIP.19630419 199003 1 008

